PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu pesyaratan dalam Menyelesaikan sarjana pendidikan strata satu (s1)

Oleh:
FEBRI ISNANDA
79530/2006

PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	**Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kota Padang**
Nama	:	**Febri Isnanda**
NIM	:	**2006/79530**
Jurusan	:	**Sosiologi**
Program Studi	:	**Pendidikan Sosiologi Antropologi**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Junaidi, S.Pd,. M.Si	**Nora Susilawati, S.Sos., M.Si**
NIP. 19680622 199403 1 002	**NIP. 19730809 199802 2 001**

Di Ketahui Oleh
Dekan Fis UNP

Prof .Dr .Syafri Anwar ,M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada tanggal 23 Juli 2014

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA DI KOTA PADANG

Nama	:	**Febri Isnanda**
NIM/BP	:	**79530 / 2006**
Program Studi	:	**Pendidikan Sosiologi- Antropologi**
Jurusan	:	**Sosiologi**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

Nama	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Junaidi, S.Pd,. M.Si	
2. Sekretaris : Nora Susilawati, S.Sos., M.Si	
3. Anggota : Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si	
4. Anggota : Ike Sylvia, S.IP, M.Si	
5. Anggota : Delmira Syafrini, S.Sos, MA	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Febri Isnanda
Bp/ Nim	: 2006/79530
Program Studi	: Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan Judul Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kota Padang adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. Baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2014

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Sosiologi

Adri Febrianto, S.Sos, M.Si
Nip:19680228 199903 1 001

Saya yang menyatakan

Febri Isnanda
2006/79530

ABSTRAK

Febri Isnanda. 2015. Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kota Padang

Rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kota Padang disebabkan karena pemilih pemula secara sadar menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari atas sikap apatis. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, diakibatkan persoalan tekhnis dalam pilkada, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kota Padang dilihat dari aspek antusias, sikap dan bentuk partisipasi politik pemilih Pemula.

Teori yang digunakan adalah teori Samuel P Huntington dan Joan M Nelson dalam *No easy choice: Political participation in developing countries:* partisipasi politik adalah "kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah (1) pemilih pemula, (2) KPU, (3) Camat dan pemuka masyarakat yang diambil dengan *teknik purposive sampling*. Lokasi penelitian ini adalah Kota Padang umumnya dan Kecamatan Padang Utara khususnya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data (1) pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Display Data, (4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa (1) antusias Pemilih Pemula pada Pilkada 2013 Kota Padang hasil penelitian menggambarkan bahwa pemilih pemula Kota Padang tahun 2013, dari semua jumlah pemilih pemula hanya sebagai kecil masyarakat yang golput., (2) sikap masyarakat pada pilkada 2013 ada yang bersikap positif, negatif, dan netral dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2013, (3) tingkat partisipasi pemilih Pemula pada Pilkada 2013 Partisipasi Politik pemilih pada Pilkada Kota Padang tahun 2013 yaitu pemberian suara, bentuk Partisipasi politik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **"Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kota Padang".** Penulisan laporan penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Adri Febrianto, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
2. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si sebagai pembimbing I, dan Ibu Nora Susilawati, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing II, yang telah ikhlas membimbing dan memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, saran, kritikan, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk orangtua yang telah membantu penulis baik segi moril dan materi penulis dalam penyelesian skripsi ini
4. Buat Suami tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Buat rekan-rekan BP 06 yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis,

Febri Isnanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Kajian Teori 9

F. Penelitian Relevan 20

G. Kerangka Konseptual 21

H. Metodologi Penelitian 21

BAB II DESKRIPSI UMUM KOTA PADANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 26

1. Profil Kota Padang 26

2. Data Geografis 28

3. Demografi 41

BAB III HASIL METODOLOGI PENELITIAN

A. Hasil Penelitian 43

B. Pembahasan 50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 39

B. Temuan Khusus Penelitian 40

C. Pembahasan 51

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kecamatan Padang Utara 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah membawa dampak yang luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia, serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah yaitu melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri, hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang terpilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur kepemerintahannya. Harapan terbesar adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik melalui Pilkada langsung ini.

Pilkada langsung di daerah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2005 sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan momentum yang baik dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka dan akuntabel. Perubahan ini setidaknya membawa implikasi yang besar bagi kehidupan di daerah. Pemimpin di daerah akan mendapat legitimasi yang kuat melalui Pilkada langsung. Dengan demikian masyarakat akan memiliki *trust* yang tinggi pada pemimpinnya untuk bersama-sama membangun daerahnya. Hal inilah yang menjadi modal dasar dalam

pelaksanaan pembangunan di daerah yaitu sebagai modal sosial dan kohesivitas masyarakat lokal yang memiliki nilai stratetegis dalam pelaksanaan *democratic governance* di tingkat lokal.

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini di landasi oleh dasar hukum yang kuat yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang – undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam konteks penguatan demokratisasi, pilkada langsung berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal dalam menuju proses demokrasi yang benar dan substansial. Inilah kehidupan demokrasi yang sebenarnya, bukan demokrasi prosedural yang selama ini telah dijalankan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi dimaknai sebagai proses yang memiliki implikasi anggaran besar dan tidak bermanfaat,

terjadinya konspirasi, pelanggaran dan keamanan yang tidak terjamin, etika politik yang terabaikan, saat inilah cara pandang demikian harus dirubah. Realitas ini terlihat dari proses demokrasi langsung yang justru menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Tingkat konflik yang tinggi, konspirasi politik, money politic bahkan dampak lain adalah tingginya korupsi di daerah.

Terlepas dari permasalahan tersebut sebenarnya Pilkada langsung memiliki makna strategis yaitu pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini terabaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Murray Print dalam Mawardi (2008), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). Aktualisasi dari civic education terletak kepada tingkat partipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu ataupun Pilkada. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Moment Pilkada inilah dijadikan tolak ukur menilai partisipasi pemilih pemula sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang baik. Semakin tinggi partisipasi menjadi nilai tersendiri akan penguatan proses pendidikan politik, demikian sebaliknya. Maka partisipasi dimaknai sebagai proses

penguatan lembaga lokal yang semakin mengerti dan memahami proses penyelenggaraan kekuasaan di daerah. Masyarakat akan semakin menyadari fungsi dan arti strategisnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan yang baik dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Menurut Robert M. Mclver dalam Budiardjo (2009:46) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Sementara itu Koentjaraningrat mengatakan "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama". Sementara itu Harold J.Lask*i* mengemukakan bahwa "Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama".

Namun sayangnya selama ini partisipasi politik hanya terbatas pada angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum ataupun Pilkada. Sebelum reformasi bergulir, angka itu selalu berada pada kisaran 90 persen, hal ini dapat dikatakan partispasi politik masyarakat tinggi. Sebenarnya realitas tidak mengehendaki pemahaman partisipasi politik yang demikian, tepatnya bukan satu-satunya ukuran tentang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau Pilkada. Partisipasi politik yang lebih penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku, dan comfortable bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya kedalam sebuah institusi formal. Pengunaan hak pilih di Kota Padang secara lebih terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kecamatan Padang Utara

Nama Kelurahan	Salinan DPT			Menggunakan Hak Pilih			Tidak Menggunakan Hak Pilih		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
Air Tawar Timur	749	908	1.657	389	492	881	360	416	776
Air Tawar Barat	3.287	3.499	6.786	1.565	1.892	3.457	1.722	1.607	3.329
Ulak Karang Utara	1.603	1.733	3.336	731	839	1.570	872	894	1.766
Ulak Karang Selata	2.972	3.009	5.981	1.390	1.831	3.221	1.582	1.178	2.760
Lolong Belanti	2.541	2.665	5.206	1.249	1.471	2.727	1.292	1.187	2.479
Alai Parak Kopi	3.668	3.972	7.640	1.904	2.455	4.359	1.764	1.517	3.281
Gunung Pangilun	3.318	3.390	6.708	1.626	2.173	3.799	1.692	1.217	2.909
Jumlah	18.138	19.176	37.314	8.854	11.160	20.014	9.284	8.016	17.300

Sumber : KPUD Kota Padang, Oktober 2013

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Padang Utara dengan jumlah penduduk 37.314 orang, yang menggunakan hal pilih ketika pilkada Kota Padang yang diselenggarakan 30 Oktober 2013, masyarakat yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 8.854 dan perempuan 11.160, sedangkan warga yang tidak menggunakan hal pilih laki-laki sebanyak 9.284 orang dan perempuan 8.016 dengan jumlah secara keseluruhan baik laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 17.300 orang, dari 17.300 orang kebanyakan pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilih dan berdasarkan data sekunder dari 7 Kecamatan Padang Barat terdapat sekitar 25% pemilih pemula dari total pemilihan secara keseluruhan.

Pada pilkada Padang putaran pertama, partisipasi pemilih menurunkan. Sekitar 47% dari 560.286 yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) tidak mengunakan hak pilih alias golput. Pada putaran kedua ini jumlah pemilih dikabarkan berkurang. Sebagaimana yang pernah dipublis KPU Padang , dari 560.286 DPT berkurang sekitar 1.425 pemilih. Penyebabnya versi KPU Padang, setelah dilakukan verifikasi data putaran

kedua ditemukan data ganda, meninggal dan pindah rumah. Aneh sekali, di zaman secanggih ini masih banyak ditemukan data pemilih ganda. Kenapa golput? Beragam sinyalemen bermunculan, penyebab tinggi angkat golput. Ada yang menyeru KPU Padang tidak maksimal dan tidak efektif memsosialisasikan tahapan-tahapan pilkada, terutama penyebaran informasi melalui media massa. Kemudian, gaung simulasi di tengah masyarakat tidak begitu lantang. Kecuali ia menyebarkan baliho dan spanduk, namun lokasi pemasangannya tidak merata, asal terpasang saja.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada disebutkan oleh Mawardi (2008) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut; Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, diakibatkan persoalan tekhnis dalam pilkada. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pilkada menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya; pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos. Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkada sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partipasi politik rakyat. Selama proses Pilkada masih didominasi oleh elit-elit partai politik

yang bermental korup, maka rakyat akan merasakan pilkada sebagai euphoria semata. Selain itu, pilkada akan menjadi euphoria ketika praktek manipulasi, money politik dan kekerasan politik masih berlangsung. Oleh karena itu rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pilkada harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan tekhnis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga memilih tidak hilang secara percuma.

Berdasarkan berbagai catatan dan kondisi rill tersebut perlu perhatian terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. Untuk itulah sekiranya perlu kajian guna mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. Mengenai berbagai dimensi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, salah satunya yaitu berkaitan dengan persepsi dan motif masyarakat dalam partisipasi. Berdasarkan hal di atas penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul "**Partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kecamatan Padang Utara Kota Padang**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kecamatan Padang Utara Kota Padang?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi pemilih pemula pada pilkada di Kecamatan Padang Utara Kota Padang dilihat dari rendahnya minat pemilih pemula, sikap dan bentuk partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis memberikan gambaran dan partisipasi masyarakat dalam pilkada putaran kedua kota Padang
2. Memberikan gambaran kepada pihak terkait bahwa antusias masyarakat dalam pilkada saat ini
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sajana pendidikan di Universitas Negeri Padang

E. Kajian Teori

Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, maka peneliti mengunakan beberapa teori dan konsep sebagai berikut:

1. Partisipasi

Bila kita mendefenisikan makna gramatikalnya, maka partisipasi dapat diartikan sebagai tindakan atau menyatakan pengambilan bagian dalam aktifitas, juga dapat diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, dapat juga digunakan kata keikut sertaan atau peran serta[1].

Kemudian **Dusselddrop** menjelaskan bahwa sebelum seseorang individu akan melibatkan dirinya pada semua kegiatan yang bersifat sukarela dalam proses partisipasi maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan baginya yaitu:

a. Bahwa situasi serta keadaan saat itu kurang memuaskan atau menguntungkan, maka perlu di ubah atau di perbaiki.
b. Bahwa situasi tersebut memang dapat diubah dan diperbaiki melalui kegiatan manusia.
c. Bahwa dia dapat atau ikut serta dalam kegiatan tersebut.
d. Bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang berguna.
e. Kemudian dia meyakini bahwa tindakan berpartisipasi akan memberikan keuntungan sosial dan materi, dan sebagainya.
f. Dalam konteks sosial dan politik ada kalanya, bahwa seringkali mengharuskan seseorang untuk ikut berparisipasi[2].
g. Bila mendefenisikan partisipasi dapat diartikan sebagai tindakan atau menyatakan pengambilan bagian dalam aktivitas, juga dapat diartikan

[1] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. 1988.
[2] Lihat skripsi Irdam Huri yang berjudul "Pulang Basamo dan Partisipasi Perantau terhadap pembangunan nagari asal. (Kasus : Perantau asal Sulit Air Kabupaten Solok)", Tahun 1997, Sosiologi, FISIP-UNAND. Hlm:21

sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, dapat juga digunakan kata keikutsertaan atau peran serta (Kamus Bahasa Indonesia, 1988).

Tilaar (2009:287) mengungkapkan

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah *(button-up)* dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyara-katnya.

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (dalam Irene A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Kemudian Dusselddrop (1999:17) menjelaskan bahwa

> Sebelum seseorang individu akan melibatkan dirinya pada semua kegiatan yang bersifat sukarela dalam proses partisipasi maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan baginya yaitu: (a) Bahwa situasi serta keadaan saat itu kurang memuaskan atau menguntungkan, maka perlu diubah atau diperbaiki, (b) Bahwa situasi tersebut memang dapat diubah dan diperbaiki melalui kegiatan manusia, (c) bahwa dia dapat atau ikut serta dalam kegiatan tersebut, (d) Bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang berguna, (e) Kemudian dia meyakini bahwa tindakan berpartisipasi akan memberikan keuntungan sosial dan materi, dan sebagainya, (f) Dalam konteks sosial dan politik ada kalanya, bahwa seringkali mengharuskan seseorang untuk ikut berpartisipasi.

Menurut Djosep, (2003:283) Dalam prakteknya, masyarakat dapat berpartisipasi secara *parsial* maupun secara holistik, sesuai dengan kompetensi masalah, keahlian dan yuridiksi yang dimilikinya, dan partisipasi masyarakat ini dapat mencakup empat tahapan penting yang masing-masingnya adalah(a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, (b) Partisipasi dalam proses pelaksanaan, (c) Partisipasi dalam menikmati hasil, (d) Partisipasi dalam proses evaluasi

Sedangkan dalam prakteknya, masyarakat dapat berpartisipasi secara *parsial* maupun secara holistik, sesuai dengan kompetensi masalah, keahlian dan yuridiksi yang dimilikinya, dan partisipasi masyarakat ini dapat mencakup empat tahapan penting yang masing-masingnya adalah:

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
b. Partisipasi dalam proses pelaksanaan.

c. Partisipasi dalam menikmati hasil.

d. Partisipasi dalam proses evaluasi[3].

2. Partisipasi Politik

Dalam pengertian secara konsep, menurut **Samuel P Huntington** dan **Joan M Nelson** dalam *No easy choice: Political participation in developing countries:* partisipasi politik adalah "kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual maupun kolektif, terorganisasi ataupun spontan, mapan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal ataupun ilegal, dan efektif atau tidak"[4]. Partisipasi politik kolektif ini pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum, dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional, seperti pemogokan yang tidak sah, menguasai bangunan umum dan huru-hara. Dan dari konsep diatas maka peneliti melihat fenomena yang terjadi dari partisipasi kolektif yang konfensional yaitu kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Pengertian partisipasi politik dalam perspektif sosiologi politik, terdapat dalam *International Encyclopedia of the Sosial*

[3] Drs, Josef Riwu Kaho, MPA. *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : jakarta, 2003, Hal:283

[4] Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan partai politik, sebuah bunga rampai*, PT.Gramedia: jakarta, 1981, Hal:2

Sciences yang dikutip oleh McClosky (dalam Miaz, 2012:22), yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui hal mana meraka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak lansung, berpatisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Sedangkan partisipasi menurut Miriam Budiardjo (dalam Miaz, 2012:21) adalah tindakan-tindakan bertujuan untuk mempengaruhi kepuasan-kepuasan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Miaz, 2012:21) "partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat". Anggota masyarakat yang berpatisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis prilaku partisipasi politik sebagai berikut :[5]

a. *Kegiatan pemilihan,* mencakup suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari

[5] Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta : Jakarta. 1990. Hlm:16

dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b. *Lobbying,* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok-kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
c. *Kegiatan organisasi,* menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan ekplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
d. *Mencari koneksi (Contacting),* merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
e. *Tindak kekerasan (Violence),* merupakan tindakan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat, maka menurut **Paigie,** terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara, yaitu :[6]

[6] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.1992. hlm :144

3. Kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi

Artinya: bahwa masyarakat memiliki minat dan perhatian terhadap masalah kewarga negaraan serta dengan kesadaran tersebut mereka ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal.

Dalam analisa kesadaran politik ini, Gabriel A.Almond dan Sidney Verba dalam penelitiannya pada lima negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko, memberikan ukuran untuk tingkat kesadaran politik ini dalam 4 macam ukuran yaitu :[7]

a. Upaya untuk menemukan seberapa banyak kepentingan yang harus ditambah pada pemerintahan lokal dan nasional disetiap negara.
b. Derajat kesadaran dan keterbukaan terhadap politik dan urusan-urusan umum.
c. Pengujian informasi politik yang dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah perbedaan mengenai penguasaan informasi politik yang dimiliki oleh warganegara yang dewasa.
d. Suatu tingkat kesiagaan masyarakat guna melaksanakan pilihan-pilihan atau menajukan berbagai pendapat tentang issue-isseu dan masalah politik.

[7] Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. *Budaya Politik (Tingkah laku politik dan Demokrasi di lima negara)*, Jakarta : Bina Aksara. 1984. Hlm : 56

4. **Status sosial dan status ekonomi,**

Status sosial dan status ekonomi ini meliputi kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai pendidikan, dimana menurut Poerbokowatjo, pendidikan adalah suatu proses pengoperan pengalaman, kecakapan dan keterampilan, dan pendidikan ini pada dasarnya terdiri dari tiga bentuk yaitu :

a. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan di sekolah yang diatur bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
b. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan, tapi tidak perlu mengikuti peraturan ketat dan tetap.
c. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak kecil hingga meninggal dunia dalam pergaulan.[8]

Faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik, dimana yang dimaksud dengan kesadaran politik disini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal[9].

[8] Lihat skripsi Zenli Iswandi, yang berjudul "Status sosial ekonomi dan partisipasi politik (Studi pada Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam)" Jurusan Ilmu Politik,FISIP-UNAND.2003. Hal:14
[9] Ramlan Surbakti, *Op.Cit*. Hlm:144.

Menurut Milbrath salah satu faktor yang penting juga dalam mempengaruhi partisipasi politik seseorang dalam politik adalah faktor karakteristik pribadi seseorang, dimana orang-orang yang berwatak sosial, yang mempunyai kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi atau dalam hal kesadaran politik, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

5. Pilkada

Dengan keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala langsung, baik untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota mulai serentak dilakukan pada tanggal 1 juni 2005. Berdasarkan pengalaman sejarah, ada empat periode pemilihan kepala daerah, yaitu periode pertama adalah periode UU No. 22/1948 dan UU No. 1/1957 ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Periode kedua, yaitu periode penetapan presiden (PenPres) No. 6 UU No. 18/1956 yang lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden, ketika diterapkan sistem Demokrasi Terpimpin dan UU No. 5/1974, dikenal dengan era Demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala daerah pada masa itu memiliki persamaan, yaitu calon kepala daerah dipilih oleh DPRD dan kemudian dari calon yang dipilih tersebut akan ditentukan kepala daerahnya oleh Presiden.

Periode ketiga, yaitu periode berlakunya UU No. 22/ 1999, memiliki perbedaan sifat dengan produk hukum sebelumnya tentang

pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pada periode keempat, dimana sistem pemilihan kepala daerah berubah dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang kemudian dipilih oleh masyarakat

Sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 56 ayat (1) dan (2), kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi apabila seseorang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala darerah atau wakil kepala daerah, maka ia harus memiliki partai yang akan mengusungnya dalam pemilihan nanti.

Dalam pasal 59 ayat (3) juga dijelaskan bahwa, partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran partai politi,m dalam pemilihan kepala daerah sangatlah penting karena partai politik merupakan kendaraan wajib seorang bakal calon untuk dicalonkan dalam pilkada dan mengikuti Pilkada.

F. Penelitian Relevan

Sebelum rancangan Penelitian ini dibuat, sudah ada peneliti lain yang melakukan penelitian tentang partisipasi politik ini, yaitu Syafraini, Zenli Iswandi, dan Annisa Purwati Ningsih dalam salah satu artikelnya yang berjudul *"Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa"*yang merupakan salah satu alumni dari Universitas Padjajaran dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menurut Syafraini, salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah keaktifan organisasi, dan ternyata terdapat hubungan antara tingkat keaktifan organisasi dengan tingkat partisipasi politik yang telah dibuktikan dengan uji statistik oleh peneliti tentang partisipasi politik mahasiswa FISIP, dimana umumnya orang yang aktif dalam organisasi cendrung aktif pula dalam hal politik.

Tidak begitu halnya, dengan penelitian yang dilakukan oleh Zenli Iswandi. Dimana menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah status sosial ekonomi yang ditandai oleh agama, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut dengan kampanye, pemberian suara pada pemilu, komunikasi indvidual, serta dengan masuk dalam organisasi politik.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan aspek yang diteliti yaitu partisipasi pemilu pemula pada Pilkada Di Kota Padang, persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti.

G. Kerangka Konseptual

Kaulamuda adalah penerus generasi bangsa untuk ditu dibutuhkan partisipasi kaulamuda dalam pemilihan kepada daerah, dengan berpartisipasi maka pemilih pemula sudah ikut membangun bangsa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

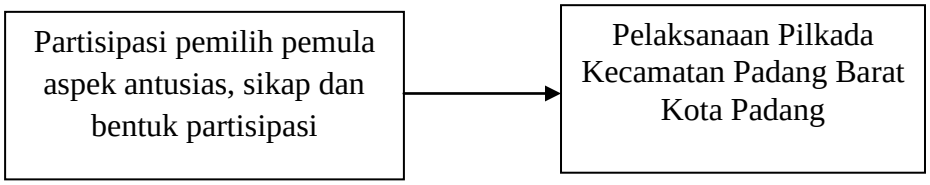

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat secara mendalam tentang fenomena yang terjadi, sehingga dengan data yang didapat peneliti mampu menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai strategi guru menggunakan bahan ajar. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau untuk mengetahui keefktifan pelaksanaan suatu program (Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2009 : 144).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Utara. Pengambilan lokasi berdasarkan pertimbangan dari hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Padang Utara, yaitu bagi pemilihan pemula pada pilkada 2014-2019.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini informan diambil dengan *teknik purposive sampling* yaitu didasarkan atas tujuan tertentu. Informan disengaja dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang diperlukan dalam penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

Setelah dilakukan penelitian, maka informan penelitian terdiri dari masyarakat, Camat dan KPU.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian (Bungin, 2008:100). Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari informan, untuk mendapatkan informasi yang lebih konkret dari

pendirian seseorang atau kelompok orang yang tidak didapat melalui pengamatan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan lebih dalam tentang pemilihan daerah kota Padang.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan metode wawancara mendalam yang bersifat terbuka. Wawancara mendalam *(indeph interview)* artinya penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran sosiologi. Sebelum ke lapangan untuk wawancara kepada informan terlebih dahulu dipersiapkan pedoman wawancara yang berisi tentang pedoman pertanyaan mengenai pelaksanaan metode diskusi yang diberikan kepada informan.

b. Dokumentasi.

Dalam pengumpulan data peneliti juga memanfaatkan dokumentasi yang ada. Menurut Arikunto (2002: 206) studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:329) mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi wawancara, dan observasi, dan dokumentasi kepada informan. Pengumpulan data melalui berbagai sumber dan wawancara dengan informan mengenai pemilihan pilkada diharapkan bisa memperkaya data.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diseleksi dan diolah yang meliputi proses memilih, menyederhanakan, menfokuskan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan yang berkaitan dengan sumber sumber belajar dan strategi yang dipergunakan.

c. Display Data

Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya tahap display data atau penyajian data, yaitu merangkai data dalam organisasi data, sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. Data diolah dan disajikan dengan merangkai data dalam organisasi data, sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjelaskan tentang makna data dalam suatu konfigurasi sehingga dapat menunjukkan kausalnya Komponen analisa data tersebut dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini:

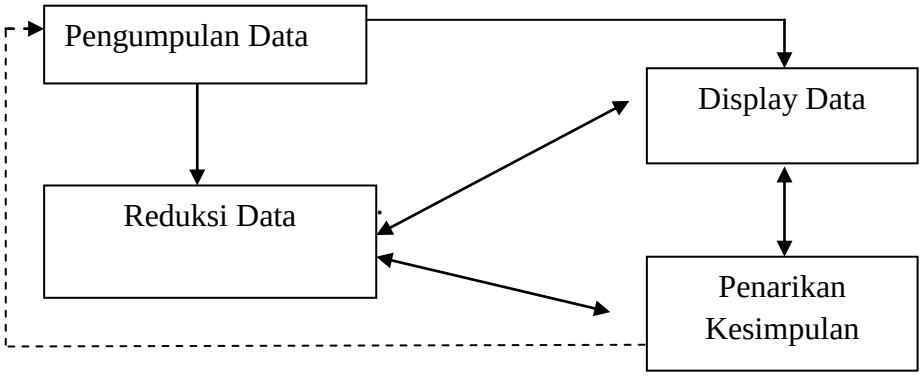

Gambar 2.1 Komponen Dalam Analisis Data
Matthew B. Milles dan A. Michael Hubbermens
(Sugiyono,2005:338)